

# AS Bakal Rampas Aset Iran untuk Ganti Rugi Perang di Selat Hormuz

Category: INTERNASIONAL

written by Iqbal Sahputra | July 29, 2026



**SEANTERONEWS.com** – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menggunakan dana dari aset Iran yang dibekukan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan kapal-kapal yang terdampak serangan di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengatakan aset Iran yang berada di bawah kendali pemerintah AS akan dimanfaatkan untuk mengganti kerugian akibat serangan terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Iran atas dampak yang ditimbulkan.

“Kita akan menggunakan uang Iran untuk membayar kerusakan yang mereka timbulkan. Dengan kata lain, uang Iran yang kita

kendalikan akan digunakan untuk mengganti kerugian,” kata Trump, seperti dikutip dari AFP, Selasa (28/7/2026).

Trump belum mengungkapkan nilai aset yang akan digunakan. Namun, Departemen Keuangan AS saat ini masih menghitung total kerugian yang ditimbulkan, sekaligus menentukan besaran aset Iran yang akan dialokasikan sebagai kompensasi.

Selain itu, pemerintah AS juga masih memfinalisasi mekanisme dan waktu pelaksanaan pengambilalihan aset tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent diketahui telah mengusulkan rencana tersebut sejak Juni 2026. Saat ini pemerintah masih melakukan penilaian terhadap biaya perbaikan kapal yang rusak akibat serangan, kerugian muatan kargo, serta dampak ekonomi yang dialami sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, rencana tersebut menuai perhatian dari sejumlah pengamat. Mereka menilai pengambilalihan aset Iran secara paksa berpotensi mempersulit proses negosiasi terkait program nuklir Iran dan upaya menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Para analis juga memperkirakan Iran akan menolak keras kebijakan tersebut karena menyangkut aset negara yang dibekukan di luar negeri.

Hingga kini, pejabat pemerintah AS belum memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang akan digunakan untuk mengambil alih aset Iran maupun potensi konsekuensi diplomatik yang dapat muncul apabila kebijakan tersebut diterapkan.[]